



Pemerintah  
Kabupaten Magelang

# RENCANA KERJA (RENJA)

---

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala hanya karena rahmat-Nya Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 dapat terselesaikan. Rencana Kerja ini merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang, pada pasal 367 menyebutkan bahwa penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Kendala yang kami hadapi dalam penyusunan Rencana Kerja adalah masih rendahnya apresiasi dalam penyusunan dokumen baik penentuan prioritas kegiatan, ketepatan waktu, validitas data maupun kelengkapan dokumen, sehingga mempengaruhi kelancaran penyusunan dokumen. Meskipun demikian sudah menjadi komitmen kami untuk menyusun Rencana Kerja ini selengkap dan sebaik mungkin sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang ikut berperan serta dalam penyusunan dan sinkronisasi rencana kerja ini. Kami sangat mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024, sehingga mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Kota Mungkid, 19 Agustus 2023



Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660304 199203 1 007

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4. Sistematika Penyusunan Renja .....	I-4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	II-21
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	II-23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-53
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	III-3
3.3. Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	III-5
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	IV-1
BAB V : PENUTUP	V-1

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretraiat Daerah .....	II-2
Tabel	2.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 .....	II-22
Tabel	2.2.1	Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 .....	II-23
Tabel	2.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretraiat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	II-25
Tabel	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Magelang .....	II-27
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabuapten Magelang Tahun 2023 .....	III-4
Tabel	3.2	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Magelang sesuai Renstra Tahun Anggaran 2024.....	III-6
Tabel	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan PD.....	IV-1
Tabel	4.2	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat Daerah Kab. Magelang Tahun 2024.....	IV-2



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terukur dan terarah sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Magelang dan digunakan sebagai evaluasi peningkatan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda dan Litbangda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

#### Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana Tahun 2024 yang disertai pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024.

### Pasal 3

- (1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Renja Dinas Kesehatan;
  - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - e. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
  - f. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - i. Renja Dinas Pertanian dan Pangan;
  - j. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Renja Dinas Perhubungan;
  - n. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - p. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - q. Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
  - r. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - s. Renja Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - t. Renja Sekretariat Daerah;
  - u. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - v. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - w. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - x. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
  - y. Renja Inspektorat;
  - z. Renja Kecamatan Salaman;
  - aa. Renja Kecamatan Borobudur;
  - bb. Renja Kecamatan Ngluwar;
  - cc. Renja Kecamatan Salam;
  - dd. Renja Kecamatan Srumbung;
  - ee. Renja Kecamatan Dukun;
  - ff. Renja Kecamatan Sawangan;
  - gg. Renja Kecamatan Muntilan;
  - hh. Renja Kecamatan Mungkid;
  - ii. Renja Kecamatan Mertoyudan;
  - jj. Renja Kecamatan Tempuran;
  - kk. Renja Kecamatan Kajoran;
  - ll. Renja Kecamatan Kaliangkrik;
  - mm. Renja Kecamatan Bandongan;
  - nn. Renja Kecamatan Candimulyo;
  - oo. Renja Kecamatan Pakis;
  - pp. Renja Kecamatan Ngablak;
  - qq. Renja Kecamatan Grabag;
  - rr. Renja Kecamatan Tegalrejo;
  - ss. Renja Kecamatan Secang;
  - tt. Renja Kecamatan Windusari; dan
  - uu. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Agustus 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 13 Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Kepala PD menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dan berpedoman pada Renstra-PD. Kepala Bappeda dan Litbangda mengkoordinasikan penyusunan RKPD dengan menggunakan Renja-PD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 25, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 265 ayat (3) menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun

KUA dan PPAS. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 merupakan pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024, dan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2024. Hal ini sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan fokus pembangunan pada perwujudan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera berdaya saing dan amanah dan tahun kelima pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor .....

14.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari rancangan akhir renja dan sebagai pedoman bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini adalah :

1. Memberikan gambaran kemampuan PD dalam melaksanakan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan serta sasaran pada tahun 2024;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2024.
4. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS PD untuk menyusun APBD Tahun 2024.

### **1.4. Sistematika Penyusunan Renja**

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renja.

#### **2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD**

Memuat tentang analisis dan evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu dan capaian renstra PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, penelaahan usulan program dan kegiatan.

#### **3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja PD, program dan kegiatan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

**4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Memuat tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan.

**5. BAB V PENUTUP**

Memuat catatan penting yang harus mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra**

Kinerja pelayanan PD merupakan capaian kinerja PD yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

*Review* capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Rencana Strategis pelaksanaan program pembangunan selama tahun 2019-2024 ditampilkan dalam Tabel 2.1. Tabel ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Setda Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2020-2023, menurut IKK, IKU dan/atau indikator kinerja mandiri pelayanan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dengan indikator menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2023, sebagaimana tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun lalu (2022 )			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd tahun berjalan		Unit PD Penanggung jawab
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	SEKRETARIAT DAERAH										
		Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100	100	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>100 %</b>	<b>97 %</b>	100 %	<b>97 %</b>	<b>97</b>	<b>100 %</b>	98	98	
		1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100	100	
		2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100	100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>7 kegiatan</b>	<b>7 kegiatan</b>	<b>7 kegiatan</b>	<b>7 kegiatan</b>	100	<b>7 kegiatan</b>	21	300	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12 laporan	12 laporan					12	100	BAGIAN PEMERINTAHAN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dokumen		12 laporan	12 dokumen	100	12 dokumen	24	66.67	
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Na laporan								BAGIAN PEMERINTAHAN
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>3 Layanan</b>	100	<b>1 Layanan</b>	7	700	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330 laporan		100 laporan	110 laporan	110	110 laporan	220	66.67	
		1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	50 perjalanan dinas	50 perjalanan dinas					50	100	
		2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	20 perjalanan dinas	0 perjalanan dinas					-	0	BAGIAN PEMERINTAHAN
		3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	40 rapat	37 rapat					37	92.5	

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>8 paket</b>	<b>2 paket</b>	<b>2 paket</b>	<b>2 paket</b>	100	<b>0 paket</b>	4	50	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedikan	6 unit		2 unit	2 unit	100	0 unit	2	33.33	
		1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket					1	100	BAGIAN PEMERINTAHAN
		2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket					1	100	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>2 layanan</b>	<b>2 layanan</b>	<b>2 layanan</b>	<b>2 layanan</b>	100	<b>2 layanan</b>	6	300	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan		12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24	66.67	
		1. Jumlah surat yang dikelola	500 surat	500 surat					500	100.00	BAGIAN PEMERINTAHAN
		2. Jumlah arsip yang dikelola	300 arsip	300 arsip					300	100.00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>160 unit</b>	<b>40 unit</b>	<b>40 unit</b>	<b>40 unit</b>	100	<b>40 unit</b>	120	75.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 unit		40 unit	40 unit	100	40 unit	80	66.67	
		1. Jumlah peralatan yang terpelihara	20 unit	20 unit					20	100	BAGIAN PEMERINTAHAN
		2. Jumlah perlengkapan yang terpelihara	20 buah	20 buah					20	100	
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>100 %</b>	<b>97.3 %</b>	100 %	<b>97.3 %</b>	97.3	<b>100 %</b>	98	98.2	
		1. Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan	100 %	100 %	100 %	94 %	93.75	100 %	98	97.917	
		2. Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Na %	100 %	Na %	Na %		0 %			
	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang tersusun</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	100	<b>3 dokumen</b>	9	300	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4	40	
		1. Jumlah Desk Pilkada dan Desk Pemilu	0 desk	0 desk							
		2. Jumlah Fasilitas Pelantikan KDH/WKDH dan Pengadaan Pakaian Bupati/Wakil Bupati	0 Fasilitas	0 Fasilitas							
		3. Jumlah Fasilitas kegiatan APKASI dan FORSEDASI	2 Fasilitas	2 Fasilitas					2	100	BAGIAN PEMERINTAHAN
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Administrasi Pemerintah	72 dokumen		24 dokumen	24 dokumen	100	24 dokumen	48	66.67	
		1. jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	21 Fasilitas	21 Fasilitas					21	100	BAGIAN PEMERINTAHAN
		2. Jumlah Fasilitas Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	1 Fasilitas	1 Fasilitas					1	100	
		3. Jumlah Dokumen Unsur Rupabumi yang Nama-namanya Telah Dibakukan	1 dokumen	1 dokumen					1	100	

		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	9 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	6	67	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1. Jumlah Dokumen LPPD	1 dokumen	1 dokumen					1	100	BAGIAN PEMERINTAHAN
		2. Jumlah Dokumen LKPJ	1 dokumen	1 dokumen					1	100	
		3. Jumlah Laporan SPM	1 dokumen	1 dokumen					1	100	
	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah</b>	<b>35 Naskah kerjasama</b>		<b>35 Naskah kerjasama</b>	<b>35 Naskah kerjasama</b>	100	<b>35 Naskah kerjasama</b>	70	200	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam negeri	105 dokumen		35 dokumen	35 dokumen	100	36 dokumen	71	68	
		Jumlah dokumen Kerjasama Daerah	35 Naskah kerjasama	35 Naskah kerjasama					35	100	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar negeri	1 dokumen	0 dokumen					-	0	BAGIAN PEMERINTAHAN
		Jumlah dokumen Kerjasama Luar Negeri	1 Naskah kerjasama	0 Naskah kerjasama					-	0	
		<b>Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100	<b>100 %</b>	100	100	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100	<b>100 %</b>	100	100	
		1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100	100	
		2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100	100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>23 kegiatan</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>5 kegiatan</b>	100	<b>5 kegiatan</b>	15	65.22	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 dokumen	12 dokumen					12	50	
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12 laporan	12 laporan					12	100	BAGIAN HUKUM
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24	100	BAGIAN HUKUM
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang terlaksana</b>	<b>12 layanan</b>	<b>3 layanan</b>	<b>3 layanan</b>	<b>3 layanan</b>	100	<b>3 layanan</b>	9	75	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 laporan		115 laporan	115 laporan	100	50 laporan	165	100	
		1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	50 kali	50 kali					50	100	BAGIAN HUKUM
		2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	0 kali	0 kali							
		3. Jumlah rapat koordinasi yang terselenggara	4 kali	4 kali					4	100	

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pengadaan</b>	<b>6 paket</b>	<b>1 paket</b>	<b>1 paket</b>	<b>1 paket</b>	100	<b>0 paket</b>	2	33.33	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit		2 unit	2 unit	100	0 unit	2	33.33	
		1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 paket	0 paket							BAGIAN HUKUM
		2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket					1	100	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>4 layanan</b>		<b>1 layanan</b>	<b>1 layanan</b>	100	<b>1 layanan</b>	2	50	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan		12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24	66.67	
		Jumlah surat yang dikelola	12000 surat	3000 surat					3,000	25.00	BAGIAN HUKUM
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>28 unit</b>	<b>7 unit</b>	<b>7 unit</b>	<b>7 unit</b>	100	<b>7 unit</b>	21	75.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit		7 unit	7 unit	100	7 unit	14	66.67	
		Jumlah peralatan yang terpelihara	7 unit	7 unit					7	100	BAGIAN HUKUM
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100	<b>100 %</b>	100	100	
		Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100	100	
	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>12 dokumen</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>6 dokumen</b>	200	<b>3 dokumen</b>	9	75	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1402 dokumen	1,402	450 dokumen	502 dokumen	112	450 dokumen	2,354	167.90	
		1. Jumlah Dokumen Propemperda	2 dokumen	2 dokumen					2	100	BAGIAN HUKUM
		Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah	500 dokumen	500 dokumen					500	100	
		2. Jumlah Dokumen Raperda	12 dokumen	12 dokumen					12	100	
		3. Jumlah Keputusan Bupati/Keputusan Kepala SKPD yang disusun	480 dokumen	480 dokumen					480	100	
		4. Jumlah Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah yang disusun	40 dokumen	40 dokumen					40	100	
		5. Jumlah Raperda yang dibahas di tingkat DPRD	9 dokumen	9 dokumen					9	100	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	200 kasus		67 kasus	75 kasus	112	67 kasus	142	71	
		1. Jumlah konsep kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama	20 konsep	20 konsep					20	100	BAGIAN HUKUM
		2. Jumlah Laporan Capaian Aksi HAM dan penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM	4 dokumen	4 dokumen					4	100	
		3. Jumlah permasalahan hukum Litigasi dan Non Litigasi	20 permasalahan hukum	20 permasalahan hukum					20	100	
		4. Jumlah Penyuluhan Hukum	6 kali	6 kali					6	100	

	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	198 dokumen		66 dokumen	72 dokumen	109.1	66 dokumen	138	69.70	
		1. Jumlah Produk Hukum Daerah	40 dokumen	40 dokumen					40	100	BAGIAN HUKUM
		2. Jumlah dokumen Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	2 dokumen	2					2	100	
		Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100.0	100 %	100	100	
		1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
		2. Presentase ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>24 Kegiatan</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>5 Kegiatan</b>	100.0	<b>6 Kegiatan</b>	18	75	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen						-	0	
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12 laporan	12 laporan					12	100	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100.0	12 dokumen	24	100	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum</b>	<b>12 Layanan</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>3 Layanan</b>	100.0	<b>3 Layanan</b>	9	75	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447 laporan		169 laporan	169 laporan	100.0	56 laporan	225	50.34	
		1. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksanaSKPD	100 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 Perjalanan Dinas Dalam Daerah					100	100	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		2. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	60 Perjalanan Dinas Luar Daerah	60 Perjalanan Dinas Luar Daerah					60	100	
		3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	9 Rapat Koordinasi	9 Rapat Koordinasi					9	100	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah paket Barang Milik Daerah</b>	<b>12 paket</b>	<b>3 Paket</b>	<b>3 Paket</b>	<b>3 Paket</b>	100.0	<b>3 Paket</b>	9	75	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit		3 unit	3 unit	100.0	3 Unit	6	66.67	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	3 paket	3 Paket					3	100	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Layanan</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>1 Layanan</b>	100.0	<b>1 Layanan</b>	3	75	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan		12 laporan	12 laporan	100.0	12 laporan	24	66.67	
		Jumlah surat yang dikelola	600 surat	600 Surat					600	100	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan yang terpelihara</b>	<b>16 paket</b>	<b>4 Paket</b>	<b>4 Paket</b>	<b>4 Paket</b>	100.0	<b>4 Paket</b>	12	75	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit		4 unit	4 unit	100.0	7 unit	11	91.67	
		Jumlah peralatan yang yang dikelola	4 paket	4 Paket					4	100	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100.0	<b>100 %</b>	100	100	
		Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Jumlah Dokumen evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	100.0	<b>3 Dokumen</b>	9	75	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	27 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100.0	9 dokumen	18	66.67	
		1. Jumlah kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang agama. 2. Jumlah Bulan Pengelolaan Islamic Center	9 dokumen	9 Dokumen					9	100	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.0	4 dokumen	8	66.7	
		Jumlah dokumen kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang kesejahteraan sosial	4 dokumen	4 Dokumen					4	100.0	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.0	4 Dokumen	8	66.7	
		Jumlah pelaksanaan kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang perlindungan perempuan dan anak, Pendidikan, kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	4 dokumen	4 Dokumen					4	100	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100.0	<b>100 %</b>	100	100	
		1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
		2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang dikelola</b>	<b>11 Kegiatan</b>	<b>11 Kegiatan</b>	<b>9 Kegiatan</b>	<b>9 Kegiatan</b>	100.0	<b>6 Kegiatan</b>	11	100.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	24 Laporan	24 Laporan					24	100	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100.0	13 Dokumen	25	69.4	
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	NA Laporan	NA Laporan							BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>10 Layanan</b>	<b>4 Layanan</b>	<b>2 Layanan</b>	<b>2 Layanan</b>	100.0	<b>2 Layanan</b>	8	80.0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204 Laporan		68 Laporan	68 Laporan	100.0	68 Laporan	136	66.7	
		1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 Kali	12 Kali					12	100	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		2. Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah yang terlaksanakan	26 Kali	26 Kali					26	100	
		3. Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksanakan	30 Kali	30 Kali					30	100	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	24 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100.0	8 Dokumen	16	66.67	
		Jumlah arsip yang di kelola	300 Dokumen	300 Dokumen					300	100	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>4 Paket</b>	<b>0 Paket</b>	<b>2 Paket</b>	<b>2 Paket</b>	100.0	<b>0 Paket</b>	2	50	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit		0 Unit	-	0	
		Jumlah paket pengadaan mebel/perlengkapan gedung kantor	3 Paket		1 Paket	1 Paket	100.0	Paket	1	33.33	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Paket	2 Unit	2 Unit	100.0	Unit	2	18.18	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 Paket					0			BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100.0	1 Layanan	3	75	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersusun	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.0	12 Laporan	24	66.67	
		Jumlah Surat yang dikelola	1250 Surat	1250 Surat					1,250	100.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100.0	14 Unit	40	68.97	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit		13 Unit	13 Unit	100.0	14 Unit	27	64.29	
		Jumlah peralatan yang dipelihara	13 Unit	13 Unit					13	100	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
		Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
		Persentase Kebijakan Perekonomian yang dijalankan	100 %	100 %					100	100	
		Persentase BUMD yang berkinerja baik	100 %	100 %					100	100	
		Persentase peningkatan sumbangan BUMD pada PAD	12 Persen	12 Persen					12	100	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah koordinasi terkait kebijakan Perekonomian yang dijalankan	96 Koordinasi	24 Koordinasi	24 Koordinasi	24 Koordinasi	100.0	24 Koordinasi	72	75	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang tersusun	54 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	100.0	18 Dokumen	36	66.67	
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	18 Koordinasi	18 Koordinasi					18	100	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		Jumlah BUMD yang dibina	5 BUMD	5 BUMD					5	100	
		Jumlah Dewan Pengawas atau Komisaris yang diseleksi	3 Orang	3 Orang					3	100	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang tersusun	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.0	2 Laporan	4	66.7	
		Jumlah koordinasi pengendalian dan distribusi perekonomian	2 Koordinasi	2 Koordinasi					2	100.0	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen					2	100.0	
		Jumlah Forum Penyelenggaraan Posko Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen					1	100.0	
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pengendalian dan distribusi Perekonomian	0 Koordinasi	0 Koordinasi							

	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang tersusun	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.0	4 Dokumen	8	66.7	
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	4 Koordinasi	4 Koordinasi					4	100	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		Jumlah Koordinasi pelaksanaan Kegiatan TPAKD Dokumen Peraturan yang disusun	3 Kali	3 Kali					3	100	
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Program Kegiatan prioritas yang di fasilitasi melalui program TJSL dan PKBU	1 Dokumen	1 Dokumen					1	100	
		Jumlah LKM yang dipersiapkan untuk berbadan Hukum dan berijin	10 LKM	10 LKM					10	100	
		Jumlah database SIKP	1 Database	1 Database					1	100	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD yang tersusun	2 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen			-	0	
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan BUMD	0 Dokumen	0 Dokumen							BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah koordinasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>88 Koordinasi</b>		<b>22 Koordinasi</b>	<b>22 Koordinasi</b>	100.0	<b>22 Koordinasi</b>	44	50	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja yang tersusun	36 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100.0	12 Dokumen	24	66.67	
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	12 Koordinasi	12 Koordinasi					12	100	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		Jumlah Pupuk Lengkap yang dimonitor	96 KPL	96 KPL					96	100	
		Jumlah PD pelaksana Pengguna DBHCHT	7 PD	7 PD					7	100	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian yang tersusun	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.0	4 Dokumen	8	66.67	
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4 Koordinasi	4 Koordinasi					4	100.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan yang tersusun	18 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100.0	6 Dokumen	12	66.67	
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	6 Koordinasi	6 Koordinasi					6	100	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

		<b>Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>90 %</b>	<b>100 %</b>	111.1	<b>94.5 %</b>	98	98.17	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100.0	<b>100 %</b>	100	100	
		1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	99.49 %	99.5	100 %	100	100	
		2. Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>12 Dok</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	100.0	<b>3 Dok</b>	9	75	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100.0	2 dokumen	8	100	
		1. Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen					1	100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		2. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen					2	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100.0	8 laporan	24	100	
		1. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen					4	100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		2. Jumlah dokumen NSPK yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen					4	100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 laporan		0 laporan	0 laporan	0.0	16 laporan	16	33.33	
		1. Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun	NA dokumen	NA dokumen							BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		2. Jumlah dokumen laporan bulanan	NA dokumen	NA dokumen							
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>28 kegiatan</b>		<b>6 kegiatan</b>	<b>6 kegiatan</b>	100.0	<b>6 kegiatan</b>	12	42.86	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12 laporan	12 laporan					12	100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100.0	12 dokumen	24	66.67	
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun	NA laporan	NA laporan							BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>12 layanan</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>2 Layanan</b>	<b>2 Layanan</b>	100.0	<b>2 Layanan</b>	7	58.33	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan		2 laporan	2 laporan	100.0	2 laporan	4	44.44	
		1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	18 perjalanan	18 perjalanan					18	100	
		2. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	10 rapat	10 rapat					10	100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		3. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	0 perjalanan	0 perjalanan							

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>7 paket</b>		<b>4 unit</b>	<b>4 paket</b>	100.0	<b>0 paket</b>	4	57.14	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit		4 unit	4 unit	100.0	0 unit	4	57.14	
		Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Na paket	NA paket							BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>1 layanan</b>		<b>1 layanan</b>	<b>1 layanan</b>	100.0	<b>1 layanan</b>	1	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan		12 laporan	12 laporan	100.0	12 laporan	24	66.67	
		Jumlah surat yang dikelola	2000 surat	2375 surat					2,375	118.75	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>60 unit</b>	<b>15 unit</b>	<b>15 unit</b>	<b>15 unit</b>	100.0	<b>15 unit</b>	45	75	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit		15 unit	15 unit	100.0	15 unit	30	66.67	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	15 unit					15	100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100.0	<b>100 %</b>	100	100	
		Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi pembangunan</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>100.0</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>9</b>	<b>75</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.0	1 dokumen	3	75	
		Jumlah dokumen fasilitasi perencanaan program pembangunan	1 dokumen	1 dokumen					1	100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Jumlah daftar penerima hibah bansos	2 daftar	2 daftar					2	100	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36 laporan		12 laporan	12 laporan	100.0	12 laporan	24	66.667	
		Jumlah dokumen pengendalian program	4 dokumen	4 dokumen					4	100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	112 laporan		28 laporan	28 laporan	100.0	28 laporan	56	50	
		Jumlah Pelaporan administrasi pembangunan yang tersusun	28 laporan	28 laporan					28	100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
		1. Persentase ketercapaian penataan organisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
		2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
		3. Persentase Ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>25 Kegiatan</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>5 Kegiatan</b>	100.0	<b>5 Kegiatan</b>	17	68	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.0		12	100	BAGIAN ORGANISASI
		Jumlah kegiatan yang dikelola	7 Kegiatan	7 Kegiatan					7	100	BAGIAN ORGANISASI
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 dokumen					12 dokumen	12	50	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang terlaksana</b>	<b>3 Layanan</b>		<b>3 Layanan</b>	<b>3 Layanan</b>	100.0	<b>3 Layanan</b>	6	200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	100.0	50 Laporan	100	66.67	
		1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	90 perjalanan	90 perjalanan					90	100	
		2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	40 perjalanan	40 perjalanan					40	100	BAGIAN ORGANISASI
		3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	20 rapat	20 rapat					20	100	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>12 paket</b>	<b>3 paket</b>	<b>0 unit</b>	<b>0 unit</b>		<b>0 paket</b>	3	25	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit		0 unit	0 unit		unit	-	0	
		1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket					1	100	BAGIAN ORGANISASI
		2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	2 paket	2 paket					2	100	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>1 layanan</b>	<b>1 layanan</b>	<b>1 layanan</b>	<b>1 layanan</b>	100.0	<b>1 layanan</b>	1	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.0	12 Laporan	24	66.67	
		Jumlah surat yang dikelola	1200 surat	2437 surat					2,437	203.08	BAGIAN ORGANISASI
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60 unit</b>	<b>15 unit</b>	<b>15 unit</b>	<b>15 unit</b>	100.0	<b>9 unit</b>	39	65.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit		15 unit	15 unit	100.0	9 unit	24	53.33	
		Jumlah peralatan yang dipelihara	15 unit	15 unit					15	100	BAGIAN ORGANISASI
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Jumlah dokumen penataan organisasi</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	100.0	<b>3 dokumen</b>	9	75	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100.0	2 dokumen	5	83.33	
		1. Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen					1	100	
		2. Jumlah dokumen evaluasi jabatan	1 dokumen	1 dokumen					1	100	BAGIAN ORGANISASI
		3. Jumlah kamus standart kompetensi jabatan yang disusun	48 dokumen	48 dokumen					48	100	

	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.0	2 Laporan	4	66.67	
		1. Jumlah dokumen ketatalaksanaan perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen					1	100.00	BAGIAN ORGANISASI
		2. Jumlah dokumen Proses Bisnis perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen					1	100.00	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	9 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100.0	3 dokumen	6	66.67	
		1. Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen							
		2. Jumlah SKPD yang menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	0 dokumen	0 dokumen							BAGIAN ORGANISASI
		3. Jumlah SKPD yang mengembangkan Zona Integritas	3 SKPD	3 SKPD					3	100	
		4. Jumlah SKPD yang mengembangkan Budaya Kerja	4 SKPD	4 SKPD					4	100	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100.0	1 dokumen	2	66.67	
		1. Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan survei kepuasan masyarakat	150 UPP	150 UPP					150	100	BAGIAN ORGANISASI
		2. Jumlah inovasi Pelayanan publik Perangkat Daerah yang diikutsertakan dalam lomba	3 Inovasi	3 Inovasi					3	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	9 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100.0	3 dokumen	6	66.67	
		1. Jumlah dokumen penetapan perjanjian kinerja, Rencana aksi PK dan Rencana Kerja Tahunan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen					2	100	BAGIAN ORGANISASI
		2. Jumlah dokumen/ bahan laporan kinerja yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen					2	100	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>100 persen</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100.0	<b>100 %</b>	100	100	
		1. cakupan kinerja layanan keprotokol dan komunikasi pimpinan	100 persen	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
		2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
		3. Persentase Ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	11 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100.0	6 kegiatan	11	100.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan keuangan yang tersusun	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.0		24	100.00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 dokumen					13 dokumen	13	54.17	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>12 layanan</b>	<b>3 layanan</b>	<b>3 layanan</b>	<b>3 layanan</b>	100.0	<b>3 layanan</b>	9	75.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1065 laporan		355 laporan	355 laporan	100.0	355 laporan	710	66.67	
		1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	50 perjalanan	50 perjalanan					50	100	
		2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	300 perjalanan	300 perjalanan					300	100	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		3. jumlah rapat koordinasi yang di selenggarakan	5 rapat	5 rapat					5	100	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>5 paket</b>		<b>1 paket</b>	<b>1 paket</b>	100.0	<b>2 paket</b>	3	60	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedikan	4 unit		1 unit	1 unit	100.0	2 unit	3	75	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket					1	100	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>1 layanan</b>		<b>1 layanan</b>	<b>1 layanan</b>	100.0	<b>1 layanan</b>	1	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan		12 laporan	12 laporan	100.0	12 laporan	24	66.67	
		Jumlah surat yang di kelola	750 surat	750 surat					750	100.00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>15 unit</b>	<b>15 unit</b>	<b>15 unit</b>	<b>15 unit</b>	100.0	<b>15 unit</b>	45	100.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit		15 peralatan	15 peralatan	100.0	15 unit	30	66.67	
		Jumlah peralatan yang terpelihara	15 peralatan	15 peralatan					15	100.00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Jumlah fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan</b>	<b>3 Fasilitasi</b>		<b>3 fasilitasi</b>	<b>3 fasilitasi</b>	100.0	<b>3 fasilitasi</b>	3	100.00	
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	360 laporan		120 kali	120 kali	100.0	120 laporan	240	66.67	
		Jumlah fasilitasi keprotokolan yang terlaksana	120 kali	120 kali					120	100.00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Komunikasi Pimpinan	72 laporan		24 dokumen	24 dokumen	100.0	24 laporan	48	66.67	
		Jumlah fasilitasi komunikasi pimpinan dan kemitraan dengan insan media yang terlaksana	24 dokumen	24 dokumen					24	100	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	198 laporan		66 dokumen	66 dokumen	100.0	66 laporan	132	66.67	
		Jumlah fasilitasi pendokumentasian yang terlaksana	66 dokumen	66 dokumen					66	100.00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>100 %</b>	<b>95.1 %</b>	<b>100 %</b>	<b>97.69 %</b>	97.7	<b>100 %</b>	98	97.60	
		1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	95.1 %	100 %	95.85 %	95.9	100 %	97	96.98	
		2. Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh	100 %	100 %	100 %	96.07 %	96.1	100 %	99	98.69	
		3. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	99.19 %	99.2	100 %	100	99.73	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>32 kegiatan</b>	<b>17 kegiatan</b>	<b>8 kegiatan</b>	<b>8 kegiatan</b>	100.0	<b>17 kegiatan</b>	42	131.25	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	426 orang/bulan		146 orang/bulan	146 orang/bulan	100.0	146 orang/bulan	292	68.54	BAGIAN UMUM
		Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan					14	100.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39 dokumen		13 dokumen	13 dokumen	100.0	13 dokumen	26	66.67	BAGIAN UMUM
		Jumlah laporan keuangan	1 laporan	1 laporan					1	100	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4 layanan</b>		<b>1 layanan</b>	<b>1 layanan</b>	100.0	<b>1 layanan</b>	2	50	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100.0	12 dokumen	24	66.7	BAGIAN UMUM
		Jumlah bulan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan					12	100.0	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum</b>	<b>12 layanan</b>		<b>3 layanan</b>	<b>3 layanan</b>	100.0	<b>3 layanan</b>	6	50.0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210 paket		70 paket	70 paket	100.0	70 paket	140	66.7	BAGIAN UMUM
		Jumlah cinder mata dan karangan bunga yang tersedia selama satu tahun	133 paket	133 paket					133	100.0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 laporan		12 laporan	12 laporan	100.0	12 laporan	24	66.7	BAGIAN UMUM
		Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu pemerintah daerah	10975 dus/paket	10975 dus/paket					10,975	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	645 laporan		215 laporan	215 laporan	100.0	215 laporan	430	66.7	BAGIAN UMUM
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana dan jumlah perjalanan dinas dalam daerah	227 kali	227 kali					227	100	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>41 paket</b>	<b>6 paket</b>	<b>6 paket</b>	<b>6 paket</b>	100.0	<b>6 paket</b>	18	43.9	
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	15 paket		1 paket	1 paket	100.0	1 paket	1	6.7	BAGIAN UMUM
		Jumlah paket pengadaan mebel/perlengkapan gedung kantor dan jumlah aset yang dikelola	10 paket	1 paket					1	10.0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit		5 unit	5 unit	100.0	6 unit	11	73.3	BAGIAN UMUM
		Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket	5 paket					5	500	

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>16 layanan</b>	<b>4 layanan</b>	<b>4 layanan</b>	<b>4 layanan</b>	100.0	<b>4 layanan</b>	12	75	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan		12 laporan	12 laporan	100.0	12 laporan	24	66.67	BAGIAN UMUM
		Jumlah surat yang dikelola	20000 surat	20000 surat					20,000	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	108 laporan		36 laporan	36 laporan	100.0	36 laporan	72	66.67	BAGIAN UMUM
		Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun	3 rekening	3 rekening					3	100.00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan		4 laporan	4 laporan	100.0	4 laporan	8	66.67	BAGIAN UMUM
		Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12,427 buah/meter/kali/paket	12941 buah/meter/kali/paket					12,941	104.14	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 laporan		12 laporan	12 laporan	100.0	12 laporan	24	66.67	BAGIAN UMUM
		Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	21 orang	21 orang					21	100.00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>155 buah</b>		<b>150 buah</b>	<b>150 buah</b>	100.0	<b>150 buah</b>	300	193.55	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit		4 unit	4 unit	100.0	4 unit	8	66.67	BAGIAN UMUM
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 buah	4 buah					4	100.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	270 unit		90 unit	90 unit	100.0	90 unit	180	67	BAGIAN UMUM
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90 buah	90 buah					90	100	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	24 unit		8 unit	8 unit	100.0	8 unit	16	67	BAGIAN UMUM
		Jumlah pemeliharaan mebel	8 unit	8 unit					8	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	132 unit		44 unit	44 unit	100.0	44 unit	88	67	BAGIAN UMUM

		Jumlah peralatan dan mesin lainnya	44 unit	44 unit					44	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 unit		9 unit	9 unit	100.0	9 unit	18	67	BAGIAN UMUM
		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9 gedung	9 gedung					9	100	
	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>16 layanan</b>	<b>4 layanan</b>	<b>4 layanan</b>	<b>4 layanan</b>	100.0	<b>4 layanan</b>	12	75	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 orang/ bulan		2 orang/bulan	2 orang/bulan	100.0	2 orang/bulan	4	67	BAGIAN UMUM
		Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 bulan	14 bulan				14 bulan	28	200	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	174 paket		58 paket	58 paket	100.0	58 paket	116	67	BAGIAN UMUM
		Jumlah Penyediaan Pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH/WKDH	56 set/buah/pasang	56 set/buah/pasang					56	100	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 orang		8 orang	8 orang	100.0	8 orang	16	67	BAGIAN UMUM
		Jumlah Pelaksanaan medical checkup KDH dan WKDH	0 orang	0 orang							
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60 orang/bulan		20 orang/bulan	20 orang/bulan	100.0	20 orang/bulan	40	67	BAGIAN UMUM
		Jumlah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27 kali	27 kali					27	100	
	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>8 layanan</b>		<b>2 layanan</b>	<b>2 layanan</b>	100.0	<b>2 layanan</b>	4	50	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga Kepala Daerah	36 paket		12 paket	12 paket	100.0	12 paket	24	67	BAGIAN UMUM
		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH	12 bulan	12 bulan					12	100	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga wakil Kepala Daerah	36 paket		12 paket	12 paket	100.0	12 paket	24	67	BAGIAN UMUM
		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga WKDH	12 bulan	12 bulan					12	100	
		Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	100 %	Na %	90 %	90 %	100.0	95 %	92	92	

	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100.0	<b>100 %</b>	100	100	
		1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
		2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0	100 %	100	100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>100.0</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	0 laporan								BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100.0	13 Dokumen	25	104	
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun	0 laporan								BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>3 layanan</b>		<b>3 layanan</b>	<b>3 layanan</b>	100.0	<b>3 layanan</b>	6	200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68 laporan		56 laporan	0 laporan	0.0	17 laporan	17	25	
		1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	0 perjalanan								
		2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	0 perjalanan								BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	0 rapat								
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>3 paket</b>		<b>1 paket</b>	<b>1 paket</b>	100.0	<b>0 paket</b>	1	33	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit		1 unit	1 unit	100.0	0 unit	1	25	
		1. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 paket						-		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		2. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 paket						-		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan</b>	<b>1 layanan</b>		<b>1 layanan</b>	<b>1 layanan</b>	100.0	<b>1 layanan</b>	1	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan		12 laporan	12 laporan	100.0	12 laporan	24	67	
		Jumlah surat yang dikelola	0 surat								BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	24 unit		14 unit	14 unit	100.0	14 unit	28	117	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit		14 unit	14 unit	100.0	12 unit	26	108	
		1. Jumlah peralatan yang dipelihara	0 unit						-		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		2. Jumlah mebeleur/perengkapan yang dipelihara	0 unit						-		
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		level 3 level (9/9) (progress)		level 3 level (4/9) (progress)	level 3 level (6/9) (progress)	150.0	level 3 level (6/9) (progress)	level 3 (6/9) level (progress)	67	
		1. Tingkat Kematangan UKPBJ	level 3 level (9/9) (progress)		level 3 level (4/9) (progress)	level 3 level (6/9) (progress)	150.0	level 3 level (6/9) (progress)	level 3 (6/9) level (progress)	67	
		2. Indeks Kematangan UKPBJ	na level						-		
	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Jumlah SKPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasanya	48 SKPD		48 SKPD	48 SKPD	100.0	48 SKPD	48	100	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	190 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	100.0	60 Dokumen	150	79	
		Jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilayani	50 paket	50 paket					50	100	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.0	1 Dokumen	2	67	
		Jumlah layanan pengadaan secara elektronik yang dikelola	5 Sistem	5 Sistem					5	100	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	212 orang		81 orang	81 orang	100.0	81 orang	162	76	
		1. Jumlah lembaga pengadaan barang dan jasa yang terbina/teradvokasi.	1 unit	1 unit					1	100	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		2. Jumlah pelaku pengadaan barang dan jasa yang terbina/teradvokasi.	50 orang	50 orang					50	100	

Berdasarkan tabel diatas, Analisis kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah berdasarkan data capaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat beberapa nama kegiatan dan sub kegiatan yang berubah nomenklaturnya akibat terbitnya Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021. Capaian program pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh program pada Sekretariat Daerah pada dengan tahun 2022 masuk dalam predikat kinerja **Tinggi** dengan nilai **98,63%** merupakan nilai rata-rata dari capaian program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota didukung 5 indikator program dengan nilai 99,65% atau berpredikat sangat tinggi, Program Perekonomian dan Pembangunan didukung 3 indikator program dengan nilai 93,83% atau berpredikat sangat tinggi dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung 3 indikator program dengan nilai 100% atau berpredikat sangat tinggi.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir renstra diperoleh capaian untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 99,51% dengan predikat sangat tinggi, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 99,4% dengan predikat sedang dan Program perekonomian dan Pembangunan sebesar 89 % dengan predikat tinggi

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD**

Analisis kinerja pelayanan PD Sekretraiat Daerah pada penetapan Renstra terdapat 2 (dua) indikator sasaran sedangkan pada Perubahan Renstra tahun 2019-2024 menjadi 3 (tiga) indikator sasaran dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			100	100	100	100		100	
2	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan Ekonomi Dan Pembangunan			90.00	94.50	100	93.83		100	
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			84.25	84.50	85.00	84.35		85	

Sumber : Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2023, data diolah.

Berdasarkan tabel 2.2 rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2022 telah mencapai 101,46 (*Sangat Tinggi*) dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra dengan target capaian 97,69% (*Sangat Tinggi*), dengan selisih capaian sebesar 3,77%.

Tabel 2.2.1  
Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Target Indikator	
			2022	2022(RPJMD)
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	2 (100.00%) 1 (99,88%)	1 (100.00%) 1 (90.00%) 1 (99.24%)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	0	0
3	66 % ≤ 75%	Sedang	0	0
4	51% ≤ 65%	Rendah	0	0
5	≤ 50	Sangat Rendah	0	0

Sumber : Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2022, data diolah.

Berdasarkan tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2022, 3 (tiga) sasaran dengan capaian sangat tinggi.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang di masa mendatang, apabila kondisi ini tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa isu strategis yang secara umum mempengaruhi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang:

1. Belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat.
2. Belum optimalnya kualitas pengusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan.

3. Belum optimalnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah.

Untuk menjawab isu/permasalahan yang ada, perlu dilakukan analisis lingkungan strategis guna penentuan langkah/kebijakan yang akan diambil. Analisis yang diambil dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019-2024, yang meliputi faktor pendorong dan penghambat pelayanan sekretariat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3  
 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah  
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah  
 dan Wakil Kepala Daerah

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing Dan Amanah” (Sedaya Amanah)</b>					
No	Misi dan Program KDH/Wakil KDH	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.	Tugas :			
		Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.	Belum optimalnya pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative	- Kebijakan dari kementerian/lembaga sering tumpang tindih dan belum adanya aturan operasional dari kebijakan yang dikeluarkan	Adanya regulasi dalam pelaksanaan fungsi koordinasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang.
	Program :	Fungsi :			
	8 Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.	1 Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;	- Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran belum konsisten	- Dokumen perencanaan lima tahunan tidak sepenuhnya dijadikan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan	- Adanya dokumen perencanaan dan proses perencanaan pada setiap tahunnya
		2 Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;	- Kebijakan/regulasi dari kementerian teknis belum bisa ditindaklanjuti secara maksimal	- Kebijakan/Regulasi belum ditindaklanjuti dalam bentuk aturan pelaksanaan/ belum dilaksanakan sosialisasi	- Adanya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD terhadap analisis kebutuhan anggaran pada masing masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah, bahwa pada rancangan awal RKPD terdapat 3 (tiga) program, 19 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.025.845.559,00 termasuk didalamnya pagu indikatif hibah. Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan pada masing-masing bagian terdapat 3 program, 19 kegiatan dan 54 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 35.473.509.312,00 lebih rendah dari pagu RKPD tetapi belum termasuk pagu indikatif untuk hibah pada Bagian Kesra. Secara terinci dapat dilihat sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Magelang

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Pemerintahan</b>			<b>224,461,835</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Pemerintahan</b>			<b>273,580,000</b>	
		<b>Bagian Pemerintahan</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>203,300,165</b>		<b>Bagian Pemerintahan</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>261,580,000</b>	
		<b>Bagian Pemerintahan</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>21,161,670</b>		<b>Bagian Pemerintahan</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>12,000,000</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Pemerintahan</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>21,161,670</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Pemerintahan</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>12,000,000</b>	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21,161,670	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12,000,000	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bagian Pemerintahan	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>2 Layanan</b>	<b>160,976,825</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bagian Pemerintahan	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>2 Layanan</b>	<b>200,000,000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	160,976,825	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	200,000,000	Menambah pagu dari pengurangan kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bagian Pemerintahan	<b>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>2 Paket</b>	<b>21,161,670</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bagian Pemerintahan	<b>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>2 Paket</b>	<b>21,000,000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	21,161,670	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	21,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bagian Pemerintahan	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>2 layanan</b>	<b>10,580,835</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bagian Pemerintahan	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>2 layanan</b>	<b>30,000,000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,580,835	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30,000,000	Kesekretariat HUT RI dianggarkan secara fungsional di Bagian Pemerintahan
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Pemerintahan	<b>Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>40 unit</b>	<b>10,580,835</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Pemerintahan	<b>Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>40 unit</b>	<b>10,580,000</b>	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	10,580,835	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	10,580,000	

		Bagian Tapem, Hukum dan Kesra	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat		17,515,340,302		Bagian Tapem, Hukum dan Kesra	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat		5,236,031,034	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan	1. Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan	100 Persen	517,916,005	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan	1. Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan	100 Persen	1,245,244,000	
	Administrasi Tata Pemerintah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang tersusun	3 dokumen	449,352,194	Administrasi Tata Pemerintah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang tersusun	3 dokumen	1,145,244,000	
	Penataan Administrasi Pemerintah	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	6 dokumen	52,480,942	Penataan Administrasi Pemerintah	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	6 dokumen	428,054,000	Kegiatan ini untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kegiatan desk pilkada dilaksanakan dalam rangka pemantauan, menginventarisir permasalahan, memberikan penyelesaian pelaksanaan pemilu/ pilkada kepada penyelenggara pilkada; Untuk mengantisipasi kenaikan iuran APKASI dan FORSEDASI karena dalam tahun 2023 pagi anggarannya sebesar 49.600.000 (APKASI 30.000.000 dan Forsedasi 10.000.000); dan Untuk memfasilitasi kegiatan Camat, Sekretaris kecamatan, Lurah dan Perangkat Kecamatan/Kelurahan lainnya.

	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Administrasi Pemerintah	24 Dokumen	211,140,564	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Administrasi Pemerintah	24 Dokumen	467,190,000	Untuk memfasilitasi kegiatan Camat, Sekretaris kecamatan, Lurah dan Perangkat Kecamatan/Kelurahan lainnya, serta Amanat PP nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembakuan Nama Rupa Bumi melalui Swakelola tidak menggunakan jasa konsultan/ pihak ketiga, namun dilaksanakan oleh Surveyor Kabupaten Magelang (Pranata Komputer)
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	185,730,688	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	250,000,000	Peningkatan kapasitas penyusunan laporan LPPD, LKPJ, dan SPM
	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Bagian Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Kerja sama yang tersusun</b>	<b>36 dokumen</b>	<b>68,563,811</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Bagian Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Kerja sama yang tersusun</b>	<b>36 dokumen</b>	<b>100,000,000</b>	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam negeri	35 dokumen	63,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam negeri	35 dokumen	95,000,000	Peningkatan kapasitas kontributor kerjasama daerah
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam negeri	1 dokumen	5,563,811	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam negeri	1 dokumen	5,000,000	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Hukum</b>			<b>154,945,267</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Hukum</b>			<b>219,771,276</b>	
		<b>Bagian Hukum</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>144,312,009</b>		<b>Bagian Hukum</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>209,138,018</b>	

		Bagian Hukum	Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD	100 persen	10,633,258		Bagian Hukum	Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD	100 persen	10,633,258	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Bagian Hukum	Jumlah kegiatan yang dikelola	6 kegiatan	10,633,258	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Bagian Hukum	Jumlah kegiatan yang dikelola	6 kegiatan	10,633,258	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Hukum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10,633,258	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Hukum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10,633,258	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bagian Hukum	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	2 layanan	79,356,263	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bagian Hukum	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	2 layanan	79,356,263	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Hukum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	79,356,263	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Hukum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	79,356,263	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bagian Hukum	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	2 paket	49,803,991	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bagian Hukum	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	2 paket	114,630,000	menyesuaikan kebutuhan anggaran tahun 2024
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Hukum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	49,803,991	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Hukum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	114,630,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Hukum	Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan	1 layanan	8,062,596	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Hukum	Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan	1 layanan	8,062,596	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Hukum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8,062,596	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Hukum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8,062,596	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Hukum	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	7 unit	7,089,159	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Hukum	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	7 unit	7,089,159	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Hukum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7,089,159	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Hukum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7,089,159	

	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Bagian Hukum</b>	<b>2. Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>538,198,407</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Bagian Hukum</b>	<b>2. Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>831,446,045</b>	
	<b>Fasilitasi dan Koordinasi</b>	<b>Bagian Hukum</b>	<b>Jumlah dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>538,198,407</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi</b>	<b>Bagian Hukum</b>	<b>Jumlah dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>831,446,045</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	450 Dokumen	208,424,463	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	450 Dokumen	274,658,000	Terdapat anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	67 Kasus	128,750,775	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	67 Kasus	275,076,000	adanya penambahan kegiatan penyuluhan hukum (kadarkum)
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	66 Dokumen	201,023,169	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	66 Dokumen	281,712,045	penambahan kebutuhan anggaran untuk kegiatan sosialisasi peraturan daerah
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Kesra</b>			<b>117,372,146</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Kesra</b>			<b>117,372,146</b>	
		<b>Bagian Kesra</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>108,580,530</b>		<b>Bagian Kesra</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>108,580,530</b>	
		<b>Bagian Kesra</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>8,791,616</b>		<b>Bagian Kesra</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>8,791,616</b>	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Kesra</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>8,791,616</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Kesra</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>8,791,616</b>	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	8,791,616	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	8,791,616	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Kesra</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>3 layanan</b>	<b>49,803,991</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Kesra</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>3 layanan</b>	<b>49,803,991</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Kesra	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169 Laporan	49,803,991	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Kesra	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169 Laporan	49,803,991	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Bagian Kesra</b>	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>3 paket</b>	<b>49,803,991</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Bagian Kesra</b>	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>3 paket</b>	<b>49,803,991</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Kesra	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	49,803,991	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Kesra	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	49,803,991	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Kesra</b>	<b>Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>1 layanan</b>	<b>4,719,052</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Kesra</b>	<b>Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>1 layanan</b>	<b>4,719,052</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Kesra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,719,052	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Kesra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,719,052	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Kesra</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>4 Peket</b>	<b>4,253,496</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Kesra</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>4 Peket</b>	<b>4,253,496</b>	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Kesra	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4,253,496	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Kesra	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4,253,496	

<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Bagian Kesra</b>	<b>3. Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100 persen</b>	<b>16,459,225,890</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Bagian Kesra</b>	<b>3. Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100 persen</b>	<b>3,159,340,989</b>	
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Bagian Kesra	<b>Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>16,459,225,890</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Bagian Kesra	<b>Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3,159,340,989</b>	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	1,706,306,198	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	2,964,361,200	jumlah pagu sama dengan tahun anggaran 2022
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	14,731,768,603	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	173,828,700	

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	21,151,089	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	21,151,089	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Perekon</b>			<b>188,442,294</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Perekon</b>			<b>188,442,294</b>	
	<b>Bagian Perekon</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>182,270,757</b>		<b>Bagian Perekon</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>180,321,238</b>	
	<b>Bagian Perekon</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>6,171,537</b>		<b>Bagian Perekon</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>8,121,056</b>	ditambah dari anggaran sub kegiatan penataan arsip Rp 1.949.519
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Perekon</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>7 kegiatan</b>	<b>6,171,537</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Perekon</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>7 kegiatan</b>	<b>8,121,056</b>	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun	12 Dokumen	6,171,537	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun	12 Dokumen	8,121,056	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Perekon</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>4 layanan</b>	<b>70,433,974</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Perekon</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>4 layanan</b>	<b>68,484,455</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Perekon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun	68 Laporan	68,484,455	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Perekon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun	68 Laporan	68,484,455	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	8 Dokumen	1,949,519	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun			Sub kegiatan di tahun 2024 dihapus
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Perekon	<b>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>10 Paket</b>	<b>99,607,982</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Perekon	<b>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>8 Paket</b>	<b>99,607,982</b>	
	Pengadaan Mebel	Bagian Perekon	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	49,803,991	Pengadaan Mebel	Bagian Perekon	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	49,803,991	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Perekon	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	49,803,991	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Perekon	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	49,803,991	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Perekon	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>5,848,557</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Perekon	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>5,848,557</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Perekon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersusun	12 Laporan	5,848,557	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Perekon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersusun	12 Laporan	5,848,557	

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Perekon	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14 unit</b>	<b>6,380,244</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Perekon	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14 unit</b>	<b>6,380,244</b>	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	6,380,244	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	6,380,244	
<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Bagian Perekon</b>	<b>1. Persentase Perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>678,910,546</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Bagian Perekon</b>	<b>1. Persentase Perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>678,910,546</b>	
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Bagian Perekon</b>	<b>Jumlah koordinasi terkait kebijakan Perekonomian yang dijalankan</b>	<b>25 Dokumen</b>	<b>198,192,266</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Bagian Perekon</b>	<b>Jumlah koordinasi terkait kebijakan Perekonomian yang dijalankan</b>	<b>25 Dokumen</b>	<b>198,192,266</b>	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang tersusun	18 Dokumen	52,904,175	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang tersusun	18 Dokumen	52,904,175	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekon	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang tersusun	2 Laporan	44,770,158	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekon	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang tersusun	2 Laporan	44,770,158	

	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang tersusun	4 Dokumen	42,323,340	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang tersusun	4 Dokumen	42,323,340	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD yang tersusun	1 Dokumen	58,194,593	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD yang tersusun	1 Dokumen	58,194,593	
	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Bagian Perekon	<b>Jumlah koordinasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>22 Dokumen</b>	<b>480,718,280</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Bagian Perekon	<b>Jumlah koordinasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>22 Dokumen</b>	<b>480,718,280</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja yang tersusun	12 Dokumen	450,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja yang tersusun	12 Dokumen	450,000,000	alokasi DBHCHT 400 juta
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian yang tersusun	4 Dokumen	21,161,670	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian yang tersusun	4 Dokumen	21,161,670	

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan yang tersusun	6 Dokumen	9,556,610	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Bagian Perekon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan yang tersusun	6 Dokumen	9,556,610	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Adminbang</b>			<b>163,201,641</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Adminbang</b>			<b>212,380,000</b>	
	<b>Bagian Adminbang</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>112,355,772</b>		<b>Bagian Adminbang</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>164,880,000</b>	
	<b>Bagian Adminbang</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>50,845,869</b>		<b>Bagian Adminbang</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>47,500,000</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Bagian Adminbang	Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	46,306,691	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Bagian Adminbang	Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	43,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Adminbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	21,378,577	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Adminbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	21,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian Adminbang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	8 Laporan	17,928,114	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian Adminbang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	8 Laporan	15,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Adminbang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	7,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Adminbang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	7,000,000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Bagian Adminbang	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>4,539,178</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Bagian Adminbang	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>4,500,000</b>	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Adminbang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Na Dokumen	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Adminbang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Na Dokumen		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Adminbang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4,539,178	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Adminbang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4,500,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bagian Adminbang	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>2 Layanan</b>	<b>47,613,758</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bagian Adminbang	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang</b>	<b>2 Layanan</b>	<b>50,000,000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Adminbang	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	47,613,758	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Adminbang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	50,000,000	sesuai pagu tahun 2022

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bagian Adminbang	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>2 Paket</b>	<b>49,803,991</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bagian Adminbang	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>2 Paket</b>	<b>100,000,000</b>	Pengadaaan kelengkapan kantor berupa : 2 bh AC ruang rapat, kelengkapan audio ruang rapat, 1 Camera zoom, 7 kursi kerja, 20 kursi rapat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Adminbang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	49,803,991	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Adminbang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Adminbang	<b>Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>6,380,244</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Adminbang	<b>Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>6,380,000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Adminbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,380,244	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Adminbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,380,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Adminbang	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>15 Unit</b>	<b>8,557,779</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Adminbang	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>15 Unit</b>	<b>8,500,000</b>	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Adminbang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8,557,779	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Adminbang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8,500,000	
	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>	<b>2. Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan</b>	<b>persen</b>	<b>204,455,079</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>	<b>2. Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan</b>	<b>100 persen</b>	<b>315,000,000</b>	
	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Bagian Administrasi Pembangunan	<b>Jumlah dokumen administrasi pembangunan</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>204,455,079</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Bagian Administrasi Pembangunan	<b>Jumlah dokumen administrasi pembangunan</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>315,000,000</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	82,831,221	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	85,000,000	

	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	40,895,261	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	110,000,000	Pengendalian dan evaluasi program lebih maximal
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	28 Laporan	80,728,597	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	28 Laporan	120,000,000	Pelaksanaan rakor POK sudah secara luring
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian PBJ</b>			<b>52,959,000</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian PBJ</b>			<b>125,559,000</b>	
		<b>Bagian PBJ</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>49,900,000</b>		<b>Bagian PBJ</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>122,500,000</b>	
		<b>Bagian PBJ</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>3,059,000</b>		<b>Bagian PBJ</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>3,059,000</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Bagian PBJ	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>6 Kegiatan</b>	<b>3,059,000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Bagian PBJ	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>6 Kegiatan</b>	<b>3,059,000</b>	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian PBJ	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3,059,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian PBJ	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3,059,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bagian PBJ	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>2 Layanan</b>	<b>23,000,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bagian PBJ	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>2 Layanan</b>	<b>40,000,000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian PBJ	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	23,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian PBJ	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	40,000,000	penambahan anggaran karena tujuan variatif

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bagian PBJ	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>3 Paket</b>	<b>14,600,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bagian PBJ	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>1 Paket</b>	<b>60,000,000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian PBJ	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	14,600,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian PBJ	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	60,000,000	penemuan sarpras bagi JF PPBJ
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian PBJ	<b>Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>4,500,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian PBJ	<b>Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>4,500,000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian PBJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian PBJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,500,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian PBJ	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>12 Unit</b>	<b>7,800,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian PBJ	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>20 Unit</b>	<b>18,000,000</b>	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian PBJ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7,800,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian PBJ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	18,000,000	adanya pelimpahan aset dari bagian adbang dan penambahan aset
	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Bagian PBJ</b>	<b>3. Tingkat Kematar</b>	<b>Level Level 3 Progres (9/9)</b>	<b>477,600,045</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Bagian PBJ</b>	<b>3. Tingkat Kema</b>	<b>Level Level 3 (9/9) Progres</b>	<b>669,600,000</b>	
	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Bagian PBJ	<b>Jumlah SKPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasanya</b>	<b>48 SKPD</b>	<b>477,600,045</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Bagian PBJ	<b>Jumlah SKPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasanya</b>	<b>48 SKPD</b>	<b>669,600,000</b>	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	70 Dokumen	226,000,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Dokumen	380,000,000	penambahan target fasilitasi pemilihan penyedia barang/jasa
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian PBJ	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	42,000,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian PBJ	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	80,000,000	penemuan standarisasi LPSE

	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	81 Orang	209,600,045	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	81 Orang	209,600,000	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Organisasi</b>			<b>395,837,503</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Organisasi</b>			<b>465,805,000</b>	
		<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>110,186,700</b>		<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>110,180,000</b>	
		<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>4,602,663</b>		<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>4,600,000</b>	
		<b>Bagian Organisasi</b>	<b>3. Prosentase ketercapaian penataan organisasi</b>	<b>100 persen</b>	<b>281,048,140</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>3. Prosentase ketercapaian penataan organisasi</b>	<b>100 persen</b>	<b>351,025,000</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>6 Kegiatan</b>	<b>4,602,663</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>6 Kegiatan</b>	<b>4,600,000</b>	Kegiatan rutin (eks BAU)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Na Dokumen	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Na Dokumen	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4,602,663	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4,600,000	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>2 Layanan</b>	<b>52,904,175</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>2 Layanan</b>	<b>52,900,000</b>	Kegiatan rutin (eks BAU)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Organisasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	52,904,175	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Organisasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	52,900,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>3 Paket</b>	<b>45,821,364</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>3 Paket</b>	<b>45,820,000</b>	Pengadaan laptop, scanner, LCD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Organisasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	45,821,364	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Organisasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	45,820,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>6,025,786</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>6,025,000</b>	Kegiatan rutin (eks BAU)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Organisasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,025,786	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Organisasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,025,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>15 Unit</b>	<b>5,435,375</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>15 Unit</b>	<b>5,435,000</b>	Kegiatan rutin (eks BAU)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Organisasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5,435,375	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Organisasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5,435,000	
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Jumlah dokumen penataan organisasi</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>281,048,140</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Jumlah dokumen penataan organisasi</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>351,025,000</b>	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	78,509,796	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	78,500,000	Tusi utama organisasi

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	43,825,819	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	43,825,000	Tusi utama organisasi
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	52,904,175	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	52,900,000	Tusi utama organisasi
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	52,904,175	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	122,900,000	Tusi Utama organisasi (Pemberian honor Tim Survei Kepuasan Masyarakat)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	52,904,175	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	52,900,000	Tusi utama organisasi
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Prokompim</b>			<b>509,561,726</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Prokompim</b>			<b>1,662,337,188</b>	
	<b>Bagian Prokompim</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>182,689,312</b>		<b>Bagian Prokompim</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>503,426,768</b>	
	<b>Bagian Prokompim</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>8,145,920</b>		<b>Bagian Prokompim</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>15,000,000</b>	
	<b>Bagian Prokompim</b>	<b>4. Cakupan Kinerja Layanan Keprotokolan dan komunikasi pimpinan</b>	<b>100 persen</b>	<b>318,726,494</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Prokompim</b>	<b>4. Cakupan Kinerja Layanan Keprotokolan dan komunikasi pimpinan</b>	<b>100 persen</b>	<b>1,143,910,420</b>	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Bagian Prokompim	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>6 Kegiatan</b>	<b>8,145,920</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Bagian Prokompim	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>6 Kegiatan</b>	<b>15,000,000</b>	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Prokompim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Na Dokumen	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Prokompim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Na Dokumen		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Prokompim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	8,145,920	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Prokompim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian Verifikasi Keuangan Maksimal
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bagian Prokompim	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>79,356,263</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bagian Prokompim	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>200,000,000</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Prokompim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	79,356,263	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Prokompim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	200,000,000	Pelayanan Pimpinan Daerah Lebih Maksimal
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bagian Prokompim	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>1 Paket</b>	<b>33,209,168</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bagian Prokompim	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>1 Paket</b>	<b>200,000,000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Prokompim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedikan	1 Unit	33,209,168	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Prokompim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedikan	1 Unit	200,000,000	Revitalisasi Sarpras untuk pelayanan Pimpinan Daerah
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Prokompim	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>58,426,768</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Prokompim	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>58,426,768</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Prokompim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	58,426,768	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Prokompim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	58,426,768	

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Prokompim	<b>Jumlah peralatan yang terpelihara</b>	<b>15 Unit</b>	<b>11,697,113</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bagian Prokompim	<b>Jumlah peralatan yang terpelihara</b>	<b>15 Unit</b>	<b>45,000,000</b>	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Prokompim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	11,697,113	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Prokompim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	45,000,000	Pemeliharaan lebih maksimal
	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Bagian Prokompim	<b>Jumlah fasilitas keprotokolan dan komunikasi pimpinan</b>	<b>3 Fasilitas</b>	<b>318,726,494</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Bagian Prokompim	<b>Jumlah fasilitas keprotokolan dan komunikasi pimpinan</b>	<b>3 Fasilitas</b>	<b>1,143,910,420</b>	
	Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Prokompim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	120 Laporan	108,770,984	Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Prokompim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	120 Laporan	315,271,860	Pelayanan Pimpinan Daerah Lebih Maksimal
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Prokompim	Jumlah Laporan Hasil Komunikasi Pimpinan	24 Laporan	104,977,755	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Prokompim	Jumlah Laporan Hasil Komunikasi Pimpinan	24 Laporan	264,273,560	Pelayanan Pimpinan Daerah Lebih Maksimal
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Prokompim	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	66 Laporan	104,977,755	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Prokompim	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	66 Laporan	564,365,000	Pelayanan Pimpinan Daerah Lebih Maksimal
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Umum</b>			<b>27,342,758,175</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Umum</b>			<b>24,241,476,828</b>	
		<b>Bagian Umum</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>7,782,036,119</b>		<b>Bagian Umum</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>7,514,196,537</b>	
		<b>Bagian Umum</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>17,825,109,590</b>		<b>Bagian Umum</b>	<b>Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan PD</b>	<b>100 persen</b>	<b>14,975,983,400</b>	
		<b>Bagian Umum</b>	<b>5. Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH</b>	<b>100 persen</b>	<b>1,735,612,466</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>5. Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH</b>	<b>100 persen</b>	<b>1,751,296,891</b>	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>17 kegiatan</b>	<b>17,825,109,590</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>17 kegiatan</b>	<b>14,975,983,400</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Umum	Jumlah orang Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	142 orang/bulan	17,665,946,321	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Umum	Jumlah orang Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	152 orang/bulan	14,800,983,400	penambahan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Umum	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 dokumen	159,163,269	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Umum	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 dokumen	175,000,000	Penambahan Bendahara Penerimaan dan bendahara Gaji
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 layanan</b>	<b>5,787,717</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 layanan</b>	<b>100,000,000</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bagian Umum	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5,787,717	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bagian Umum	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	100,000,000	Penambahan rekening belanja, rapat koordinasi konsultasi dan kunjungan kerja (perjalanan dinas), honorarium narasumber serta pembinaan kepegawaian di Lingkungan Setda (9 bagian)
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>1,442,591,051</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>1,667,082,494</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 paket	67,082,494	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 paket	67,082,494	sesuai tahun 2022
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bagian Umum	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	952,275,155	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bagian Umum	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1,000,000,000	penambahan jamuan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 laporan	423,233,402	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 laporan	600,000,000	penambahan 2 orang staf ahli
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>10 Paket</b>	<b>417,064,775</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>10 Paket</b>	<b>220,000,000</b>	
	Pengadaan Mebel	Bagian Umum	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	177,583,445	Pengadaan Mebel	Bagian Umum	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	100,000,000	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	239,481,330	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	120,000,000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>2,477,177,697</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>2,226,372,264</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	96,285,599	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	47,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Bagian Umum	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	36 Laporan	1,098,925,529	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Bagian Umum	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	36 Laporan	1,020,840,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	348,434,305	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	225,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	933,532,264	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	933,532,264	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>150 buah</b>	<b>3,439,414,879</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>150 buah</b>	<b>3,340,741,779</b>	
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bagian Umum	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	339,271,471	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bagian Umum	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	250,000,000	
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bagian Umum	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	90 Unit	961,132,372	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bagian Umum	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	90 Unit	961,132,372	

	Pemeliharaan mebel	Bagian Umum	Jumlah mebel yang dipelihara	8 Unit	54,377,028	Pemeliharaan mebel	Bagian Umum	Jumlah mebel yang dipelihara	8 Unit	54,377,028	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bagian Umum	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 Unit	171,265,629	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bagian Umum	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 Unit	161,864,000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	1,913,368,379	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	1,913,368,379	
	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Bagian Umum	<b>Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>4 layanan</b>	<b>1,430,884,416</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Bagian Umum	<b>Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>4 layanan</b>	<b>1,358,921,891</b>	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	190,453,973	Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	180,999,000	sesuai tahun 2022
	Penyediaan Pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	58 paket	101,755,891	Penyediaan Pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	58 paket	101,755,891	sesuai tahun 2022
	Pelaksanaan Medical Chek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah orang yang mengikuti Medical Chek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang	21,161,670	Pelaksanaan Medical Chek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah orang yang mengikuti Medical Chek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang	20,000,000	sesuai tahun 2022
	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 orang/bulan	1,117,512,882	Penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 orang/bulan	1,056,167,000	

<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	Bagian Umum	<b>Jumlah Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>2 layanan</b>	<b>304,728,050</b>	<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	Bagian Umum	<b>Jumlah Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>2 layanan</b>	<b>392,375,000</b>	
Penyediaan kebutuhan Rumah tangga Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga Kepala Daerah	12 paket	171,409,528	Penyediaan kebutuhan Rumah tangga Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga Kepala Daerah	12 paket	200,750,000	kenaikan bahan baku
Penyediaan kebutuhan Rumah tangga wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga wakil Kepala Daerah	12 paket	133,318,522	Penyediaan kebutuhan Rumah tangga wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga wakil Kepala Daerah	12 paket	191,625,000	kenaikan bahan baku
TOTAL ANGGARAN SETDA				48,025,845,559					35,473,509,312	

Berdasarkan tabel diatas jumlah program dan kegiatan tidak mengalami perubahan tetapi pada sub kegiatan terdapat 1 sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Untuk total pagu anggaran pada Sekretariat Daerah terdapat penurunan nilai anggaran, tetapi apabila dicermati pada masing-masing bagian terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Pemerintahan, sedangkan penurunan anggaran terdapat pada Bagian Umum dikarenakan berkurangnya alokasi gaji ASN.

Penambahan anggaran pada Bagian Pemerintahan dalam rangka persiapan desk pemilihan kepala daerah dan fasilitas kecamatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk memaksimalkan kegiatan bina mental spiritual dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk revitalisasi sarpras dan pelayanan pimpinan.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Dalam perencanaan tahun 2024, Setda telah melaksanakan rapat koordinasi PD Sekretariat Daerah dengan mengundang para pemangku kepentingan yaitu bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Dari hasil koordinasi tersebut program dan kegiatan yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 telah sesuai dengan harapan dari tiap bagian sebagai pemangku kepentingan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Setda atau sebutan lain adalah unsur pembantu tugas Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 2, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah:

- a. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- d. Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah.
- e. Pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- g. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;
- h. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pemerintahan sebagai salah satu upaya dalam mendukung agenda prioritas pemerintah yang dituangkan dalam bentuk NAWACITA yang merupakan Sembilan prioritas pembangunan oleh pemerintah. Dalam NAWACITA kedua mengamatkan pelaksanaan pemerintahan difokuskan pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya, dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan informasi dan pelayanan di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melakukan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kulaitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise atas kinerja pelayanan publik, serta

membuka ruang partisipasi melalui *citizen charter* dalam undang-undang kontrak pelayanan publik.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD**

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap visi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dalam waktu satu sampai lima tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dalam rangka mencapai memecahkan permasalahan serta menangani Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 terdapat perubahan sasaran dari dua sasaran menjadi tiga sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sasaran Perubahan Renstra Tahun 2019-2024:

1. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.
2. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan Pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah.

Secara terperinci tujuan, sasaran, indikator serta dan kinerja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah  
Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja 2023	Kondisi Akhir Kinerja (2024)
				2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	65,02 (B)	67,01 (B)	67,01 (B)	71,00 (BB)
		Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.	72,50	Na	Na	Na
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,00	Na	Na	Na
		Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat	Na	100%	100%	100%
		Meningkatnyanya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	Na	90%	94.5%	100%
		Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Na	84,25 (Baik)	84.5 (Baik)	85.00 (Baik)

Sumber : Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024

### **3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Setda Tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Setda Tahun 2024 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta penataan ruang dan prasarana wilayah dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.
4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
5. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Setda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Setda Tahun 2024 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang serta penyusunan perencanaan anggaran (budgeting) agar mencapai visi, misi dan mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat Daerah.
2. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebanyak 3 program, 19 kegiatan, 54 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang  
Sesuai dengan Renstra Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		4 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			2 Fasilitasi Kunjungan Tamu
			3 Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Pengadaan Mebel
			2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			3 Pemeliharaan Mebel
			4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
		8 Administrasi Keuangan dan Operasional KD dan WKD	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		9 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
			2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		10 Penataan Organisasi	1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
			2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
			3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
			4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
			5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		11 Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Fasilitasi Keprotokolan
			2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
			3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Administrasi Tata Pemerintahan	1 Penataan Administrasi Pemerintahan
			2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
			3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	2 Fasilitasi Kerjasama Daerah	1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
		3 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
			2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
	3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		
	4 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
		2 Fasilitasi Bantuan Hukum	
		3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
			2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
			3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
			4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
		2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
			2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
			3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		3 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
			2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
			3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		4 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
			2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
			3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Sumber : Aplikasi SIPD Kab Magelang Tahun 2024

## B A B IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja (Renja-PD) merupakan acuan untuk meningkatkan pelayanan dan mewujudkan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan skala prioritas pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Usulan anggaran belanja termasuk belanja gaji ASN dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp47.231.201.388,00 (*Empat puluh tujuh milyar duaratus tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*), dengan rincian pendanaan pada masing-masing bagian sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Bagian	Pagu Renja
1	Pemerintahan	838,533,213
2	Organisasi	131,189,248
3	Hukum	509,084,307
4	Perekonomian	495,976,887
5	Administrasi Pembangunan	208,336,928
6	Kesejahteraan Rakyat	16,733,594,766
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	575,515,916
8	Pengadaan Barang dan Jasa	27,478,397,580
9	Umum	260,572,543
Total		<b>47,231,201,388</b>

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id.

Sedangkan rencana kerja dan pendanaan pada masing-masing program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renja Setda Tahun 2024 sebagaimana lampiran berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAGELANG  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>						<b>838.533.213,00</b>								<b>1.566.824.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>838.533.213,00</b>								<b>1.566.824.000,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>838.533.213,00</b>								<b>1.566.824.000,00</b>	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian penataan organisasi</i>	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	90.330.000,00						-		276.580.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah kegiatan yang dikelola</i>	-			65 Kegiatan	7.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Laporan Keuangan Bagian Pemerintahan	-		15.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Laporan Keuangan Bagian Pemerintahan			15.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</i>	-			28 Layanan	69.060.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas	-		200.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				110 Laporan	69.060.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas		200.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			17 Paket	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	-	21.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		21.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			13 Layanan	8.630.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Surat Keluar dan Masuk	-	30.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	8.630.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Surat Keluar dan Masuk		30.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			227 Unit	5.140.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan	-	10.580.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	5.140.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan		10.580.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
2.	4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan</b>	-			100 persen	748.203.213,00						-	1.290.244.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang tersusun	-			3 Dokumen	698.238.559,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Layanan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	-	1.195.244.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				10 Dokumen	441.223.744,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Layanan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan		478.054.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				24 Dokumen	161.085.908,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Layanan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan		467.190.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				3 Dokumen	95.928.907,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Layanan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan		250.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Jumlah Dokumen Kerja sama yang tersusun</i>	-			36 Dokumen	49.964.654,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Magelang, Luar Daerah Kabupaten Magelang, Pihak Ketiga	-	95.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>				35 Dokumen	49.964.654,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Magelang, Luar Daerah Kabupaten Magelang, Pihak Ketiga		95.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
		<b>BAGIAN ORGANISASI</b>							<b>131.189.248,00</b>							<b>395.837.503,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>131.189.248,00</b>							<b>395.837.503,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>131.189.248,00</b>							<b>395.837.503,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian penataan organisasi Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah</i>	-			100 % 100 % 100 % 100 %	131.189.248,00						-	395.837.503,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah kegiatan yang dikelola</i>	-			65 Kegiatan	2.300.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Kegiatan yang dikelola	-	4.602.663,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	2.300.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Kegiatan yang dikelola		4.602.663,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</i>	-			28 Layanan	18.158.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Rapat koordinasi dan perjalanan dinas	-	52.904.175,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	18.158.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Rapat koordinasi dan perjalanan dinas		52.904.175,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			17 Paket	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan mesin	-	45.821.364,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan mesin		45.821.364,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			13 Layanan	2.995.050,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Surat Keluar dan Masuk	-	6.025.786,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	2.995.050,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Surat Keluar dan Masuk		6.025.786,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			227 Unit	2.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan gedung kantor	-	5.435.375,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.500.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan gedung kantor		5.435.375,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	-			3 Dokumen	105.236.198,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD Kabupaten Magelang	-	281.048.140,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	45.348.698,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD Kabupaten Magelang		78.509.796,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	13.147.500,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD Kabupaten Magelang		43.825.819,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi															
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	15.870.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD Kabupaten Magelang		52.904.175,00	BAGIAN ORGANISASI	
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana															
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD Kabupaten Magelang		52.904.175,00	BAGIAN ORGANISASI	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				3 Dokumen	15.870.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD Kabupaten Magelang		52.904.175,00	BAGIAN ORGANISASI	
		<b>BAGIAN HUKUM</b>							<b>509.084.307,00</b>							<b>986.391.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>509.084.307,00</b>							<b>986.391.000,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>509.084.307,00</b>							<b>986.391.000,00</b>		
1.	4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian penataan organisasi</i>	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	41.269.170,00						-	154.945.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	-			65 Kegiatan	5.316.500,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	10.633.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	5.316.500,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.633.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	-			28 Layanan	28.441.670,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	79.356.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	28.441.670,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		79.356.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			17 Paket	0,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	49.804.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		49.804.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			13 Layanan	4.031.000,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.062.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.031.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.062.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			227 Unit	3.480.000,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.090.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	3.480.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.090.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Persentase perumusan kebijakan pemerintahan yang dijalankan</i>	-			100 % 100 % NA % 100 %	467.815.137,00						-	831.446.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	-			3 Dokumen	467.815.137,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	831.446.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				450 Dokumen	131.640.029,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		274.658.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				67 Kasus	192.867.750,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		275.076.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				66 Dokumen	143.307.358,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		281.712.000,00	BAGIAN HUKUM
		<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>						<b>495.976.887,00</b>							<b>867.252.940,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>495.976.887,00</b>							<b>867.252.940,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>495.976.887,00</b>							<b>867.252.940,00</b>	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian penataan organisasi Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</i>	-			100 % 100 % 100 % 100 %	34.009.545,00						-	188.342.394,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah kegiatan yang dikelola</i>	-			65 Kegiatan	4.049.041,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.121.056,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	4.049.041,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.121.056,00	BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	-			28 Layanan	23.951.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	68.484.455,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68 Laporan	23.951.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		68.484.455,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			17 Paket	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	99.607.982,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		49.803.991,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		49.803.991,00	BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			13 Layanan	2.923.950,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.848.557,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	2.923.950,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.848.557,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			227 Unit	3.085.554,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.280.344,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				14 Unit	3.085.554,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.280.344,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi Indeks Kematangan UKPBJ Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dijalankan</i>	-			100 % NA level %	461.967.342,00						-	678.910.546,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Jumlah koordinasi terkait kebijakan Perekonomian yang dijalankan</i>	-			25 Dokumen	47.398.777,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Dokumen kebijakan perekonomian pembangunan	-	198.192.266,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>				18 Dokumen	15.871.390,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Dokumen kebijakan perekonomian pembangunan		52.904.175,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>				2 Laporan	19.407.826,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Dokumen kebijakan perekonomian pembangunan		44.770.158,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>				4 Dokumen	12.119.561,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	Dokumen kebijakan perekonomian pembangunan		42.323.340,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD</i>				1 Dokumen	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen kebijakan perekonomian pembangunan		58.194.593,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Jumlah koordinasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam</i>	-			22 Dokumen	414.568.565,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		-	480.718.280,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i>				12 Dokumen	414.568.565,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			450.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian</i>				4 Dokumen	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			21.161.670,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan</i>				6 Dokumen	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			9.556.610,00	BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>						<b>208.336.928,00</b>								<b>317.852.729,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>208.336.928,00</b>							<b>317.852.729,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>208.336.928,00</b>							<b>317.852.729,00</b>		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian penataan organisasi</i>	-			100 % 100 % 100 % 100 %	54.678.868,00						-	113.397.650,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun</i>	-			3 Dokumen	21.514.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD	-	46.306.691,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				8 Dokumen	10.238.400,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD		21.378.577,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				8 Laporan	5.905.600,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD		17.928.114,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				20 Laporan	5.370.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan PD		7.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</i>	-			28 Layanan	2.654.146,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan keuangan Bagian Administrasi Pembangunan	-	4.539.178,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	2.654.146,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan keuangan Bagian Administrasi Pembangunan		4.539.178,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	23.020.582,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	47.613.758,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	23.020.582,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		47.613.758,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			13 Layanan	3.190.140,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi surat menyurat	-	6.380.244,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	3.190.140,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi surat menyurat		6.380.244,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			227 Unit	4.300.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan kantor dan mesin lainnya	-	8.557.779,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	4.300.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan kantor dan mesin lainnya		8.557.779,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah</i>	-			100 %	153.658.060,00						-	204.455.079,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen administrasi pembangunan	-			3 Dokumen	153.658.060,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan	-	204.455.079,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	15.160.197,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan		82.831.221,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	56.913.950,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan		40.895.261,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan															
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				28 Laporan	81.583.913,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan		80.728.597,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						16.733.594.766,00								16.332.742.100,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						16.733.594.766,00							16.332.742.100,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						16.733.594.766,00							16.332.742.100,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian penataan organisasi Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</i>	-			100 % 100 % 100 % 100 %	26.930.000,00						-	72.540.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah kegiatan yang dikelola</i>	-			65 Kegiatan	4.395.500,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	8.791.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				3 Dokumen	4.395.500,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		8.791.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</i>	-			28 Layanan	18.050.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	4.980.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	18.050.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.980.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			17 Paket	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	49.800.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		49.800.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			13 Layanan	2.359.500,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.719.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				600 Laporan	2.359.500,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.719.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			227 Unit	2.125.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.250.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.125.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.250.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-			100 %	16.706.664.766,00						-	16.260.202.100,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-			3 Dokumen	16.706.664.766,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD dan Masyarakat	-	16.260.202.100,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				9 Dokumen	16.577.461.666,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		16.238.087.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB</i>				4 Dokumen	120.757.800,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		20.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i>				4 Dokumen	8.445.300,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		2.115.100,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		<b>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>							<b>575.515.916,00</b>							<b>1.662.337.188,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>575.515.916,00</b>								<b>1.662.337.188,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>575.515.916,00</b>								<b>1.662.337.188,00</b>	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh Persentase ketercapaian penataan organisasi</i>	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	575.515.916,00								1.662.337.188,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah kegiatan yang dikelola</i>	-			65 Kegiatan	7.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	-	15.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah		15.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</i>	-			28 Layanan	70.164.723,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	200.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				355 Laporan	70.164.723,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		200.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			17 Paket	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	200.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			13 Layanan	29.213.384,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	58.426.768,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	29.213.384,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		58.426.768,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			227 Unit	22.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	45.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	22.500.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		45.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Jumlah fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan</i>	-			3 Fasilitasi	446.137.809,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	1.143.910.420,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				120 Laporan	110.191.906,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		315.271.860,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				24 Laporan	106.770.223,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		264.273.560,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>				66 Laporan	229.175.680,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		564.365.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		<b>BAGIAN UMUM</b>						<b>27.478.397.580,00</b>							<b>28.306.636.866,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>27.478.397.580,00</b>							<b>28.306.636.866,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>27.478.397.580,00</b>							<b>28.306.636.866,00</b>	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penataan organisasi Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</i>	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	27.478.397.580,00						-	28.306.636.866,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah kegiatan yang dikelola</i>	-			65 Kegiatan	19.228.880.866,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN di Setda dan dokumen peryanggungjawaban keuangan	-	19.246.180.866,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				150 Orang/bulan	19.071.180.866,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN di Setda dan dokumen peryanggungjawaban keuangan		19.071.180.866,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				13 Dokumen	157.700.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN di Setda dan dokumen peryanggjawaban keuangan		175.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			1 Layanan	50.000.000,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN SETDA	-	100.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				13 Dokumen	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN SETDA		100.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</i>	-			3 Layanan	1.517.082.000,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Perlengkapan kantor, perjalanan dan makan minum rapat	-	1.667.082.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				70 Paket	67.082.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Perlengkapan kantor, perjalanan dan makan minum rapat		67.082.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	1.000.000.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Perlengkapan kantor, perjalanan dan makan minum rapat		1.000.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				215 Laporan	450.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Perlengkapan kantor, perjalanan dan makan minum rapat		600.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			17 Paket	0,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Mebel dan peralatan kantor	-	220.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Unit	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Mebel dan peralatan kantor		100.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Mebel dan peralatan kantor		120.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			13 Layanan	2.152.660.839,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	listrik, air, telepon, surat, SS	-	2.226.372.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	47.000.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	listrik, air, telepon, surat, SS		47.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	1.020.840.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	listrik, air, telepon, surat, SS		1.020.840.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	190.000.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	listrik, air, telepon, surat, SS		225.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	894.820.839,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	listrik, air, telepon, surat, SS		933.532.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			227 Unit	2.773.512.875,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Barang barang di Setda	-	3.090.741.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	215.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Barang barang di Setda		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				90 Unit	768.905.600,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Barang barang di Setda		961.132.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				8 Unit	26.972.370,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Barang barang di Setda		54.377.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				44 Unit	155.525.993,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Barang barang di Setda		161.864.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				9 Unit	1.607.108.912,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Barang barang di Setda		1.913.368.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	-			4 Layanan	1.363.886.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	KDH dan WKDH	-	1.363.886.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	180.999.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	KDH dan WKDH		180.999.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				58 Paket	106.720.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	KDH dan WKDH		106.720.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				8 Orang	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	KDH dan WKDH		20.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				20 Orang/Bulan	1.056.167.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	KDH dan WKDH		1.056.167.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	-			2 Layanan	392.375.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	392.375.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah															
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	200.750.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		200.750.000,00	BAGIAN UMUM	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah															
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	191.625.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		191.625.000,00	BAGIAN UMUM	
		<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>							<b>260.572.543,00</b>							<b>530.559.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>260.572.543,00</b>							<b>530.559.000,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>260.572.543,00</b>							<b>530.559.000,00</b>		
1.	4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah</i>	-			100 % 100 %	15.239.900,00						-	52.959.000,00		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah kegiatan yang dikelola</i>	-			6 Kegiatan	1.529.500,00				4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Kegiatan yang dikelola	-	3.059.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	1.529.500,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Kegiatan yang dikelola		3.059.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</i>	-			2 Layanan	7.562.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Perjalanan dinas dan rapat	-	23.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				18 Laporan	7.562.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Perjalanan dinas dan rapat		23.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			1 Paket	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan mesin	-	14.600.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan mesin		14.600.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			1 Layanan	2.248.400,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Surat masuk dan keluar	-	4.500.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	2.248.400,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Surat masuk dan keluar		4.500.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Unit	3.900.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan gedung kantor dan mesin	-	7.800.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	3.900.000,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan gedung kantor dan mesin		7.800.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Tingkat kematangan UKPBJ</i>	-			level 3 (9/9) level	245.332.643,00						-	477.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah SKPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasanya</i>	-			48 SKPD	245.332.643,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan Pelaku Usaha	-	477.600.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				60 Dokumen	90.158.346,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan Pelaku Usaha		226.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	67.414.520,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan Pelaku Usaha		71.600.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				81 Orang	87.759.777,00	- Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan Pelaku Usaha		180.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	<b>J U M L A H</b>							<b>47.231.201.388,00</b>						<b>50.966.433.326,00</b>		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Selanjutnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 akan dijadikan pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam menjalani tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Sekretariat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini.

Kota Mungkid, 19 Agustus 2023



Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660304 199203 1 007